



Keberhasilan Pendampingan Akreditasi Satuan PAUD Sejenis: Penelitian Kasus Tunggal

Agung Prihantoro^{1✉}, Farida Agus Setiawati²

Pendidikan Agama Islam, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia⁽¹⁾

Psikologi, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia⁽²⁾

DOI: [10.31004/obsesi.v7i6.4007](https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.4007)

Abstrak

Sebagian lembaga PAUD tidak siap mengikuti akreditasi nasional dan karenanya membutuhkan persiapan dan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan pendampingan akreditasi terhadap SPS dalam rangka memenuhi dan mengunggah kelengkapan dokumen PPA di Sispena 3.1. tahap demi tahap. Metodologi penelitiannya adalah penelitian kasus tunggal tipe *descriptive time-series experiment*. Pengumpulan datanya dilakukan dengan mengambil data sekunder *single time series* dari BAN PAUD dan PNF Provinsi dan wawancara dengan pendamping dan SPS tentang apa saja yang terjadi sebelum kemunculan *single time series*. Analisis data dilakukan dengan mengurai data *single time series* dan data tentang apa saja yang terjadi sebelum kemunculan *single time series* sehingga teridentifikasi komponen-komponen dan tren pendampingan akreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan dikarenakan kerja sama, perencanaan dan kesungguhan dari Dinas Pendidikan Kabupaten, organisasi mitra, pendamping, BAN PAUD dan PNF Provinsi, dan lembaga PAUD. Keberhasilan ini juga didukung oleh materi pendampingan yang mencakup pemberian motivasi kepada lembaga PAUD, penjelasan yang tepat tentang akreditasi, dan pengajaran keterampilan *scan* dan mengunggah dokumen ke internet.

Kata Kunci: *pendampingan akreditasi; penilaian prasyarat akreditasi; satuan paud sejenis; motivasi.*

Abstract

Some childcares are not ready to be accredited and therefore need to be guided. The research aims to analyze successfullnes of guiding a childcare to complete and upload the prerequisite documents of accreditation step by step. Research methodology employed was single-case research of descriptive time-series experiment. Secondary data of *single time series* was collected from National Board of Accreditation of Childhood and Nonformal Education and primary data was collected by interviewing a guider and teachers of Melati Nayan Childcare. The data was analyzed by decomposing the single time series into trends in relation to primary data. The results indicate that successfullnes of the guidance was supported with cooperation among Disctrict Board of Education, partner, National Board of Accreditation of Childhood and Nonformal Education, accreditaion guide and childcare. The successfullnes was also supported with guiding materials that were motivating childcare, explanation of accreditation and teaching skills of scanning and uploading documents.

Keywords: *accreditaion guide; assessment of prerequisite document; childcare; motivation*

Copyright (c) 2023 Agung Prihantoro & Farida Agus Setiawati

✉ Corresponding author : Agung Prihantoro

Email Address : aprihantoro@ucy.ac.id (Yogyakarta, Indonesia)

Received 4 January 2023, Accepted 17 December 2023, Published 17 December 2023

Pendahuluan

Lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) tidak selalu siap menghadapi akreditasi dan gagal ketika mengikuti akreditasi (Denboba et al., 2015). Harapannya, lembaga-lembaga PAUD siap sedia menghadapi akreditasi dengan memenuhi delapan standar pendidikan nasional. Ketidaksiapan ini berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan dana Pos PAUD (Muldiani et al., 2020), ketidakpahaman pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) tentang akreditasi (Fithri & Anggraini, 2018), ketidaklengkapan dokumen administrasi TK (Aminah & Amiliya, 2021), data KB dan TK yang tidak dikelola dengan baik (Andarwati & Dwipasari, 2014), rendahnya pemenuhan standar isi (Busron & Rachmi, 2020), dan buruknya pengelolaan standar biaya (ILYAS, 2020). Dibandingkan dengan TK, jenis-jenis lembaga Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Pos PAUD lebih tidak siap untuk mengikuti akreditasi, sebab sumber-sumber daya KB, TPA, SPS dan Pos PAUD lebih terbatas, dan ini menjadi kendala bagi pemenuhan kuota akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal pada tahun 2022 (BAN PAUD dan PNF Provinsi DIY, 2022). Maka, keikutsertaan KB, TPA, SPS dan Pos PAUD dalam akreditasi perlu diapresiasi secara khusus, dan mereka membutuhkan pendampingan agar siap mengikuti akreditasi.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang kesiapan atau persiapan dan pendampingan KB, TPA, SPS dan Pos PAUD untuk mengikuti akreditasi mengkaji kondisi awal dan kondisi akhir lembaga dengan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif (Muldiani et al., 2020; Andarwati & Dwipasari, 2014; Busron & Rachmi, 2020; Ilyas, 2020). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji perkembangan atau proses tahap demi tahap persiapan dan pendampingan lembaga dengan metodologi penelitian kasus tunggal (*single-case research*). Penelitian lain menunjukkan bahwa motivasi sejumlah lembaga pengasuhan anak untuk mengikuti akreditasi itu tinggi, tetapi lagi-lagi penelitian itu tidak menunjukkan tahap-tahap akreditasi lembaga-lembaga tersebut (Lee, 2014). Alhasil, terdapat kekosongan penelitian (*research gap*) tentang persiapan dan pendampingan terhadap KB, TPA, SPS dan Pos PAUD dalam mengikuti akreditasi dan hasil pendampingannya tahap demi tahap dengan metodologi penelitian kasus tunggal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan pendampingan akreditasi terhadap KB, TPA, SPS atau Pos PAUD dalam rangka memenuhi dan mengunggah (*upload*) kelengkapan dokumen-dokumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) di Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) 3.1. secara daring tahap demi tahap. Dengan perkataan lain, pertanyaan penelitian ini ialah bagaimanakah keberhasilan pendampingan akreditasi terhadap KB, TPA, SPS atau Pos PAUD dalam rangka memenuhi dan mengunggah (*upload*) dokumen-dokumen PPA di Sispena 3.1 tahap demi tahap? Penelitian ini berhipotesis bahwa pendampingan ini sangat berhasil. Pendampingan akreditasi ini dilakukan atas kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal (BAN PAUD dan PNF) Provinsi. Keberhasilan pendampingannya diukur hanya dengan persentase unggahan PPA sebagai syarat untuk dilakukan visitasi, validasi dan verifikasi akreditasi.

Penelitian ini berargumen bahwa pendampingan akreditasi terhadap KB, TPA, SPS atau Pos PAUD sangat perlu dilakukan. KB, TPA, SPS atau Pos PAUD tidak diwajibkan mengikuti akreditasi, sehingga mereka mengikuti akreditasi karena kesadaran sendiri atau dorongan dari pihak-pihak tertentu. Tidak semua KB, TPA, SPS atau Pos PAUD memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti akreditasi. Pun, tidak semua KB, TPA, SPS atau Pos PAUD memahami makna akreditasi, tahap-tahapnya dan juga syarat-syaratnya. Sehingga, perlu dilakukan pendampingan untuk membangkitkan kesadaran dan motivasi guna mengikuti akreditasi dan untuk memahami makna akreditasi dan memenuhi syarat-syarat awal akreditasi. Dengan pendampingan ini, KB, TPA, SPS atau Pos PAUD berhasil memenuhi

syarat-syarat itu. Argumen tersebut didukung oleh teori, hasil penelitian dan pembahasan di bawah ini.

Pendampingan akreditasi adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang menguasai akreditasi terhadap KB, TPA, SPS dan Pos PAUD serta TK untuk membantu lembaga-lembaga tersebut agar siap mengikuti akreditasi (Nuryanto & Irmade, 2019; Won & Adriany, 2020). Orang yang menguasai akreditasi ialah asesor (Purba et al., 2022), tetapi di Mississippi Amerika Serikat pendampingnya adalah perguruan tinggi (Stader et al., 2009). Lembaga-lembaga PAUD di Amerika Serikat pada masa lalu memang membutuhkan dukungan dan pendampingan akreditasi (Whitebook et al., 2004). Aktivitas pendampingan itu berupa penjelasan tentang hal-hal akreditasi, pemberian motivasi agar lembaga bersemangat untuk mengikuti akreditasi, termasuk oleh pemerintah (Won & Adriany, 2020; Winterbottom & Piasta, 2015; Flee & Li, 2016; Rhee, 2007), dan pembimbingan penyiapan pelaksanaan akreditasi (Aminah & Amiliya, 2021). Pendampingan juga berwujud pelatihan dan *workshop* tentang pemenuhan 8 standar pendidikan dan bantuan dalam penyusunan dan perbaikan dokumen-dokumen akreditasi serta pengunggahan dokumen-dokumen tersebut ke Sispena (Hasan et al., 2021).

Penjelasan hal-hal akreditasi menyangkut pengertian akreditasi, tahap-tahap akreditasi, dokumen-dokumen akreditasi, aktivitas-aktivitas pembelajaran, prasarana dan sarana pendidikan. Esensi kualitas pendidikan juga perlu disampaikan kepada pengelola PAUD (Honig, 2022). Akreditasi merupakan aktivitas evaluasi kepatutan program dan satuan pendidikan berdasarkan suatu kriteria, yakni delapan standar pendidikan, yakni kompetensi lulusan (tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini), isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Delapan standar pendidikan menjadi acuan dalam menyelenggarakan akreditasi.

Penyelenggaraan akreditasi PAUD dan PNF dilakukan dalam tiga tahap, yakni Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), visitasi dan validasi (Supriyono et al., 2022). Di sini, hanya dipaparkan tahap pertama, yaitu KPA, karena pendampingan akreditasi ini berfokus pada keberhasilan tahap pertama. KPA, lanjut Supriyono, adalah menilai persyaratan awal akreditasi. Persyaratan awal akreditasi berupa lima prasyarat dan delapan standar pendidikan dalam bentuk dokumen yang diunggah di Sispena 3.1. Lima prasyarat itu ialah unggahan-unggahan (1) surat permohonan akreditasi, (2) surat izin penyelenggaraan/izin operasional/izin pendirian program, (3) daftar jumlah peserta didik (minimal 10 orang peserta didik), (4) sertifikat kompetensi bidang PAUD milik pendidik (minimal seorang pendidik memiliki sertifikatnya), dan (5) dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (BAN PAUD dan PNF, 2022). Tahap KPA ini disebut *structural quality*, sedangkan tahap visitasi dinamakan *process quality* (Cassidy et al., 2005; Suchodoletz et al., 2020).

Sementara itu, PPA-nya berupa unggahan dokumen-dokumen delapan standar pendidikan (BAN PAUD dan PNF, 2022). (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA) terdiri dari dokumen-dokumen deteksi perkembangan anak dan deteksi pertumbuhan anak. (2) Standar isi berisikan dokumen-dokumen KTSP, acuan KTSP, dan layanan pendidikan menurut kelompok usia. (3) Standar proses terdiri dari dokumen-dokumen perencanaan pembelajaran, supervisi pembelajaran, dan keterlibatan orang tua. (4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan berisikan dokumen-dokumen kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. (5) Standar sarana dan prasarana berisikan dokumen-dokumen inventaris sarana bermain anak dan data luas dan kepemilikan lahan. (6) Standar pengelolaan terdiri dari dokumen-dokumen perencanaan satuan, pengorganisasian dan pelaksanaan. (7) Standar pembiayaan berisikan dokumen-dokumen rencana anggaran dan administrasi keuangan. Terakhir, (8) standar penilaian terdiri dari dokumen-dokumen penilaian perkembangan anak dan laporan perkembangan anak. Untuk mengunggah dokumen-dokumen tersebut, lembaga PAUD harus bisa *log in* ke Sispena 3.1., dan teknologi

Sispena 3.1 secara otomatis menyaring lembaga-lembaga PAUD yang terjadwal untuk melakukan akreditasi.

Setelah unggahan PPA lembaga PAUD di Sispena 3.1 mencapai minimal 80%, tahap KPA dilakukan oleh seorang asesor yang ditunjuk oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi (Supriyono et al., 2022). Asesor mengklasifikasikan permohonan akreditasi dengan menilai kelengkapan dokumen PPA. Jika hasil penilaian dokumen lembaga PAUD tersebut mencapai minimal 60% (skor 600), proses akreditasi berlanjut ke tahap visitasi. Apabila hasil penilaian dokumen PPA kurang dari 60%, lembaga PAUD itu masih berkesempatan untuk memperbaiki dan menambah dokumen selama batas waktu KPA belum berakhir. Namun, jika sampai batas waktu KPA berakhir dan jumlah unggahan dokumen PPA tidak mencapai akreditasinya berhenti dan tidak bisa berlanjut. Lembaga PAUD itu harus melengkapi dokumen PPA dan mengikuti KPA lagi.

Namun, untuk melengkapi dokumen PPA, pendidik, kepala atau tenaga kependidikan PAUD perlu menguasai teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Padahal, mereka pada umumnya tidak menguasai TIK: tidak menggunakan multimedia, tidak tersedia wifi di sekolah, tidak memiliki Android, tidak memiliki media sosial, tidak pernah menggunakan *search engine*, (Febrialismanto, 2020). Sebagian pendidik PAUD juga tidak menguasai MS Word, *spreadsheet*, dan Power Point (Wernely, 2018). Penguasaan TIK yang rendah berpengaruh pada kinerja pendidik dalam aktivitas pembelajaran dan pendidikan PAUD (Febrialismanto, 2020).

Lembaga PAUD yang diteliti di sini ialah SPS. SPS merupakan bentuk satuan PAUD nonformal yang menawarkan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan layanan-layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, 2014). Program pendidikan di SPS bisa diselenggarakan secara mandiri tanpa terintegrasi dengan layanan lain, sebagaimana KB, TPA dan Pos PAUD.

Metodologi

Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kasus tunggal (*single case research*) tipe *descriptive time-series experiment* dengan pendekatan eklektik-empiris (Kratochwill & Levin, 2015). Penelitian kasus tunggal ini meneliti sebuah kasus yang berupa pendampingan akreditasi pada satu lembaga SPS. Penelitian kasus tunggal tipe *descriptive time-series experiment* ini mengurai *single time series* keberhasilan pendampingan akreditasi tahap demi tahap pada SPS itu dan mengidentifikasi komponen, proses dan hasil pendampingan tersebut tahap demi tahap.

Langkah-langkah penelitiannya adalah, *pertama*, mengumpulkan data *single time series* tentang persentase unggahan PPA di Sispena 3.1. Langkah kedua adalah mengumpulkan data tentang proses pendampingan akreditasi dan perkembangan kondisi SPS sebelum dan selama SPS tersebut mengunggah dokumen PPA. Langkah ketiga ialah menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan mengurai data persentase unggahan PPA dan data tentang pendampingan akreditasi SPS dan perkembangan kondisi SPS sebelum dan selama pengunggahan dokumen PPA. Sehingga, teridentifikasi komponen, proses dan hasil pendampingan akreditasi pada SPS tersebut tahap demi tahap. Langkah-langkah penelitian ini secara visual tampak pada Gambar 1.

Time-series experiment dalam penelitian ini ialah hasil pendampingan akreditasi terhadap SPS Melati Nayan Maguwoharjo Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memenuhi dan mengunggah kelengkapan dokumen-dokumen PPA di Sispena 3.1. Di sini, lembaga SPS Melati Nayan merupakan kasus tunggal. Hasil pendampingannya berupa persentase unggahan dokumen PPA di Sispena 3.1. sejak SPS Melati Nayan mendapat pendampingan pada bulan Maret 2022 sampai Oktober 2022 ketika unggahan dokumen PPA dari 0% sampai 95,65%, sehingga SPS tersebut melangkah ke tahap akreditasi berikutnya. SPS

Melati Nayan menunjukkan data *time-series experiment* yang lebih progresif secara bertahap daripada lembaga-lembaga dampingan lainnya. Itulah alasan mengapa penelitian ini dilakukan terhadap SPS Melati Nayan. Data *time-series experiment* diperoleh dari BAN PAUD dan PNF DIY.

Aktivitas-aktivitas pendampingan akreditasi terhadap SPS Melati Nayan dilakukan sebelum dan selama lembaga tersebut memulai tahap pertama akreditasi. Pendampingan dilakukan oleh seorang asesor yang dibantu oleh seorang sekretaris. SPS Melati Nayan merupakan salah satu dari 22 lembaga PAUD yang mengikuti pendampingan dalam kelompok pendampingan ini. Data tentang aktivitas pendampingan ini diperoleh melalui wawancara dengan pendamping, kepala SPS Melati Nayan, dan pendidik SPS Melati Nayan yang melengkapi dan mengunggah dokumen-dokumen PPA dalam akreditasi tahap pertama. Wawancara dengan pendamping dilakukan pada hari Kamis 8 Desember 2022 pukul 07.30 – 08.00 WIB di PAUD KB Nurul Ilmi Jetis Argomulyo Cangkringan Sleman DIY sedangkan wawancara dengan Kepala SPS Melati Nayan pada hari Senin 2 Januari 2023 pukul 14.30 – 15.00 WIB di SPS Melati Nayan dan wawancara dengan seorang pendidik SPS Melati Nayan yang menangani akreditasi hari Senin 2 Januari 2023 pukul 15.00 – 15.30 WIB di rumahnya di Nayan Maguwoharjo Depok Sleman DIY. Langkah penelitian disajikan dengan bagan pada gambar 1.

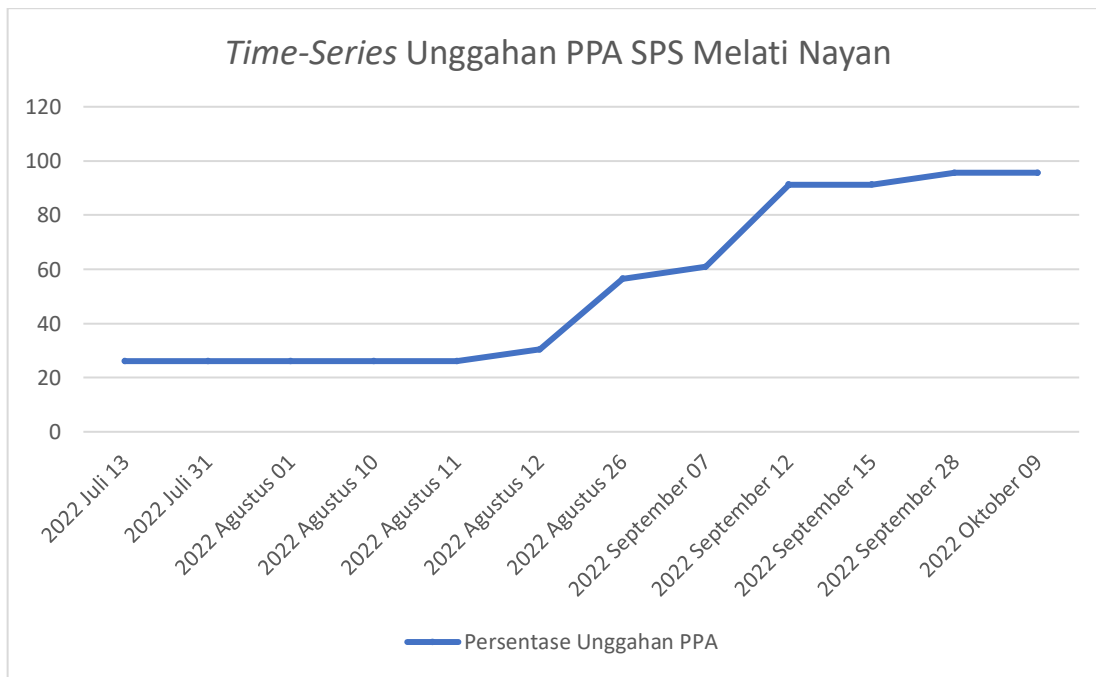


Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini berupa persentase unggahan PPA SPS Melati Nayan sebagai *time-series* dan aktivitas-aktivitas pendampingan akreditasi. Persentase unggahan PPA SPS Melati Nayan di Sispena 3.1 sejak 13 Juli 2022 sampai 9 Oktober 2022. Selama itu pula, pendampingannya berlangsung. Persentase unggahan PPA SPS Melati Nayan terlihat pada grafik Gambar 2 yang menunjukkan satu penting. Kenaikan persentase unggahan PPA SPS Melati Nayan tidak merata selama tiga bulan dan bisa dibagi jadi tiga tahap (**Tabel 1**). Kenaikan yang paling tinggi berlangsung pada tahap kedua (Agustus – September 2022) sebesar 66,21%, sedangkan kenaikan paling rendah terjadi pada tahap pertama (Juli – Agustus 2022) sebesar 0%, dan kenaikan sedang terjadi pada tahap ketiga (September – Oktober 2022) sebesar 4,35%. Sementara itu, rerata kenaikannya adalah 23,19/bulan atau 0,77/hari. Hasil wawancara dengan pendamping, kepala dan pendidik SPS Melati Nayan menjelaskan mengapa hal itu terjadi.

BAN PAUD dan PNF DIY mencatat bahwa persentase unggahan dokmen PPA SPS Melati Nayan sebesar 26,09% pada tanggal 13 Juli 2022. Wawancara dengan pendamping dan pendidik SPS Melati Nayan menunjukkan bahwa SPS Melati Nayan mulai mengunggah dokumen PPA pada bulan Maret 2022. Dua informan itu tidak ingat tepatnya tanggal berapa tepatnya SPS Melati Nayan mengunggah dokumen PPA (**gambar 2**). SPS Melati Nayan mengunggah dokumen setelah mengikuti sosialisasi peningkatan mutu dan kemudian pendampingan akreditasi, tetapi pengunggahannya mandek karena SPS ragu-ragu apakah akan melanjutkan proses akreditasinya atau tidak.



Gambar 2. Grafik Time-Series Persentase Unggahan PPA SPS Melati Nayan

Tabel 1. Tahap Kenaikan Unggahan PPA SPS Melati Nayan

Tahap	Bulan	Kenaikan Unggahan PPA (%)
1	Juli – Agustus 2022	0
2	Agustus – September 2022	66,21%
3	September – Oktober 2022	4,35%

Pendidik SPS Melati Nayan mengatakan bahwa sosialisasi peningkatan mutu PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman DIY pada bulan Maret 2022 di hotel kepada lembaga-lembaga PAUD, termasuk SPS Melati Nayan. SPS Melati Nayan diundang untuk mengikuti sosialisasi itu karena sebelumnya telah mengisi form tentang lembaga-lembaga PAUD yang sama sekali belum pernah melakukan akreditasi. Selanjutnya, pendamping menuturkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman membentuk tim-tim pendamping akreditasi dan memberikan surat tugas kepada para pendamping. Setiap tim pendamping terdiri dari seorang pendamping dan seorang sekretaris yang mendampingi sejumlah lembaga PAUD. Dalam tim pendamping SPS Melati Nayan, terdapat 21 lembaga PAUD lainnya, dan mereka kemudian membuat grup WhatsApp (WA) untuk koordinasi.

Ketika SPS Melati Nayan mengisi form dan mengikuti sosialisasi peningkatan mutu dan lalu pendampingan akreditasi, kepala dan pendidik SPS Melati Nayan mengaku enggan untuk melakukan akreditasi. Kepala SPS mengatakan bahwa untuk apa akreditasi dan tanpa akreditasi pun, SPS-nya tetap berjalan dengan 29 peserta didik. Pendamping juga mengatakan, kebanyakan lembaga PAUD beranggapan negatif tentang akreditasi.

Kepala SPS Melati Nayan: *“Sudah begini saja (tidak usah ikut akreditasi). Yang penting SPS jalan.”*

Pendidik SPS Melati Nayan: *“Tempat kita belum punya gedung sendiri. Belum memadai, istilahnya.”*

Pendamping: *“Di awal, mereka agak takut dengan akreditasi. ... Mereka takut disalahkan ketika diinterwui. Awalnya, mereka mengatakan, ‘Kenapa harus akreditasi segala. Untuk apa?’”*

Setelah mengikuti sosialisasi peningkatan mutu dan pendampingan akreditasi, SPS Melati Nayan mulai termotivasi untuk melakukan akreditasi, tetapi motivasi itu fluktuatif.

Motivasi SPS Melati Nayan untuk melakukan akreditasi ialah mereka berpikiran bahwa lembaga mereka harus meningkat dan pendamping juga mengatakan hal yang sama. Namun, SPS Melati Nayan sempat berniat mundur dari proses akreditasi karena dua sebab. Sebab pertama adalah terjadi perbedaan pendapat internal; ada yang setuju untuk lanjut akreditasi dan ada yang tidak setuju. Pendapat yang tidak setuju itu berpengaruh pada mereka yang setuju. Sebab kedua, sebab eksternal, ialah jarak yang dirasa jauh antara tempat tinggal pendidik SPS Melati Nayan dan tempat pertemuan pendampingan akreditasi. Sehingga, mereka hanya mengikuti tiga kali pertemuan luring pendampingan di PAUD KB Nurul Ilmi Jetis Argomulyo Cangkringan. Mereka beberapa kali tidak menghadiri pertemuan dengan mengatakan bahwa mereka sibuk, padahal alasan yang sebenarnya bukanlah kesibukan. Itulah yang membuat persentase unggahan dokumen PPA SPS Melati Nayan tetap 26,09 dari bulan Maret sampai 11 Agustus 2022.

Melihat motivasi SPS Melati Nayan yang fluktuatif ini, pendampingnya dan Pengurus Cabang HIMPAUDI Depok memotivasinya melalui grup WA yang telah mereka bentuk, melalui komunikasi pribadi via pesan WA dan telepon. Motivasi melalui WA secara berkali-kali itulah yang membuat SPS Melati Nayan bersemangat lagi untuk mengikuti akreditasi. Pendampingnya menyediakan waktu kapan saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari SPS Melati Nayan dan menyatakan bahwa yang penting ialah maju akreditasi dan hasilnya itu soal nanti dan bahwa akreditasi tahun depan belum tentu mudah. Komunikasi lembaga-lembaga dampingan lain di grup WA juga menyemangati SPS Melati Nayan. Motivasi yang bertubi-tubi inilah yang membuat SPS Melati Nayan bangkit lagi untuk melakukan akreditasi dan mengunggah dokumen-dokumen PPA.

Pendidik SPS Melati Nayan: *"Harus ada peningkatan. ... Kalau tidak ada peningkatan, belum ternilai lembaganya. Sempat mau mundur. Jadi, ada undangan pendampingan, saya tidak berangkat. Kita stag(nan) saja, tapi pendamping kadang telepon (untuk memotivasi)."*

Lalu, SPS Melati Nayan menyiapkan dokumen-dokumen PPA dan mengunggahnya dengan bertanya kepada pendamping dan lembaga-lembaga PAUD lain dalam kelompoknya. Pendidik SPS Melati Nayan bertanya tentang format dokumen yang akan diunggah, tentang cara men-*scan* dokumen-dokumen itu, dan tentang cara mengunggahnya ke Sispena 3.1. Pendampingnya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan mengajari cara menyusun dokumen-dokumen PPA, cara men-*scan*-nya dan cara mengunggahnya. Lembaga-lembaga PAUD lainnya juga mengirim contoh dokumen yang sudah mereka unggah kepada SPS Melati Nayan via WA. Pendidik-pendidik SPS Melati Nayan lain yang pernah mempunyai pengalaman men-*scan* dan mengunggah sesuatu ke internet pun membantu pendidik yang mengurus akreditasi ini. Pendidik itu juga dibantu oleh anak kandungnya yang lebih melek teknologi.

Pendamping: *"(Pendampingannya berupa) diskusi. Lebih interaktif. Justru yang banyak bersuara itu peserta, bertanya. ... Kita mengajari download CamScanner, mengaplikasikan CamScanner di HP-HP mereka yang support."*

Setelah mengunggah dokumen-dokumen PPA, pendidik SPS Melati Nayan itu kemudian bertanya kepada pendamping tentang persentase unggahannya. Karena pendidik itu dan pendampingnya tidak memiliki akses untuk melihat persentasenya, si pendamping bertanya kepada anggota BAN PAUD dan PNF DIY yang memiliki aksesnya. Anggota BAN PAUD dan PNF DIY ini kemudian memberikan informasi persentase unggahan itu kepada pendamping yang selanjutnya meneruskan informasinya ke pendidik SPS Melati Nayan. Pertambahan persentase unggahan PPA ini menambah semangat pendidik SPS Melati Nayan untuk terus melengkapi dan mengunggah dokumen-dokumennya. Sehingga, akhirnya pada 12 September 2022 persentase unggahan PPA-nya mencapai 91,30% dan pada 28 September 2022 telah 95,65%. Unggahannya tidak bertambah lagi karena sudah memenuhi syarat KPA.

Setelah PPA-nya memenuhi syarat KPA, SPS Melati Nayan memasuki tahap-tahap berikutnya. SPS Melati Nayan lolos tahap KPA dan kemudian memasuki tahap visitasi pada 27 September 2022. Tahap terakhir adalah validasi, verifikasi dan penetapan status akreditasi, dan BAN PAUD dan PNF dalam Keputusan Nomor: 134/BAN PAUD DAN PNF/ AKR/2022 Tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi D.I. Yogyakarta Tahap III Tahun 2022 menetapkan bahwa status akreditasi SPS Melati Nayan adalah B. Ini membuktikan bahwa pendampingan akreditasi SPS Melati Nayan pada tahun 2022 berhasil.

Keberhasilan pendampingan akreditasi dengan pemberian motivasi, penjelasan perihal akreditasi dan pengajaran keterampilan penyusunan, *scan* dan pengunggahan dokumen PPA ini secara umum sama dengan hasil-hasil penelitian lainnya, tetapi detail pendampingan pada satu lembaga PAUD dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya (Muldiani et al., 2020; Andarwati & Dwipasari, 2014; Busron & Rachmi, 2020; Lee, 2014). Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain di Indonesia (Won & Adriany, 2020). Penelitian tentang pendampingan akreditasi SPS Melati Nayan ini mendeskripsikan bagaimana motivasi untuk mengikuti akreditasi itu berawal dari pendataan Dinas Pendidikan Kabupaten tentang lembaga-lembaga PAUD, termasuk SPS Melati Nayan, yang belum terakreditasi. Kemudian, lembaga-lembaga tersebut diundang untuk mengikuti sosialisasi peningkatan mutu pendidikan secara luring. Pendataan dan sosialisasi ini telah mendorong dan memotivasi SPS Melati Nayan untuk meningkatkan kualitas lembaganya dengan mengikuti akreditasi.

Kontribusi pihak-pihak eksternal SPS (pemerintah dan pendamping) cukup besar dalam keberhasilan tahap awal akreditasi ini, dan hal tersebut berbeda dengan keberhasilan akreditasi lembaga PAUD (*early childhood care and education*) di Amerika Serikat masa kini, bukan masa lalu (Whitebook et al., 2004). Lembaga-lembaga PAUD di Amerika kini berusaha sendiri secara terus-menerus dan mengikuti visitasi akreditasi tambahan sekali atau dua kali, sehingga mereka berhasil terakreditasi (Horm et al., 2019). Kemandirian lembaga-lembaga PAUD di Amerika Serikat untuk mengikuti akreditasi terlihat jelas, bahkan dengan pendekatan bisnis (Williams3120896, 2019), meskipun mereka, sama seperti di Indonesia saat ini, tidak wajib alias sukarela untuk mengikuti akreditasi (Boyd-Swan & Herbst, 2020). Padahal, pendampingan SPS Melati Nayan ini hanya pada awal akreditasi (tahap KPA) sebagai *structural quality*, yang lebih mudah daripada tahap visitasi (*process quality*) (Cassidy et al., 2005; Suchodoletz et al., 2020).

Peran pemerintah daerah di Indonesia juga berbeda dengan perannya di Norwegia dan Turki. Pemerintah daerah di Norwegia dan Turki lebih berperan sebagai pemonitor kualitas layanan pendidikan, kualitas pendidik dan kualitas perkembangan peserta didik, bukan pendampingan dan pembinaan akreditasi PAUD (Engel et al., 2015; Gol-Guven, 2017). Namun, pemerintah negara bagian Florida Amerika Serikat sangat mendorong lembaga-lembaga PAUD untuk mengikuti akreditasi (Winterbottom & Piasta, 2015). Kualitas PAUD, meminjam khazanah penjaminan mutu di perguruan tinggi (Pavlakis & Kelley, 2016), seharusnya dijamin dan ditingkatkan secara terus-menerus oleh pemerintah dan lembaga PAUD, bukan hanya ketika akan mengikuti akreditasi (Wong & Li, 2010). Penjaminan dan peningkatan mutu ini, pada gilirannya, menciptakan budaya mutu (Harvey, 2023). Sebaliknya, jika akreditasi dipandang sebagai kegiatan insidental lima tahunan, bukan sebagai pembudayaan mutu yang berkelanjutan, akreditasi akan gagal meningkatkan mutu pendidikan (Pan et al., 2010).

Motivasi SPS Melati Nayan untuk mengikuti akreditasi naik turun karena sebab-sebab internal dan eksternal. Sebab internal ini tidak diketahui oleh pendamping karena SPS Melati Nayan tidak mengatakannya secara terus-terang. Namun, motivasi yang diberikan secara terus-menerus oleh pendamping, PC HIMPAUDI dan lembaga-lembaga PAUD lainnya kepada SPS Melati Nayan menjadi SPS tersebut termotivasi lagi. Berbeda halnya, lembaga-lembaga PAUD di Amerika Serikat memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti akreditasi

(Boyd-Swan & Herbst, 2020). Inilah pentingnya pemberian motivasi dengan cara-cara dan kata-kata yang tepat kepada lembaga PAUD khususnya di Indonesia dan umumnya Asia (Wong et al., 2010).

Selain motivasi, penjelasan bahwa akreditasi itu sesuatu yang bagus, tidak menakutkan dan semacamnya penting untuk mengubah anggapan atau persepsi negatif lembaga PAUD. Jika akreditasi tidak menyenangkan, tentu lembaga-lembaga PAUD enggan untuk melakukan akreditasi. Di sinilah peran pendampingan secara berkelompok dan individual untuk meyakinkan lembaga PAUD bahwa anggapan atau persepsi negatif mereka tentang akreditasi itu keliru. Penelitian-penelitian lain tidak mengakaji hal ini.

Kemudian, bahwa sebagian pendidik dan tenaga kependidikan PAUD tidak menguasai TIK ini sama dengan hasil-hasil penelitian lain. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan akreditasi yang komunikatif, interaktif dan berpusat pada pesertanya berhasil mengatasi keterbatasan pendidik PAUD dalam penguasaan teknologi, khususnya dalam hal *scan* dan mengunggah dokumen ke internet. Harapannya, kebijakan akreditasi, dengan atau tanpa pendampingan, membuat para pendidik PAUD makin rajin dan rapi dalam mendokumentasikan hal-hwal di lembaga-lembaganya (Grant et al., 2017).

Detail keberhasilan pendampingan akreditasi tahap demi tahap sampai persentase unggahan PPA lembaga PAUD mencapai angka yang diharapkan dalam penelitian ini menambah penelitian-penelitian tentang pendampingan akreditasi PAUD. Pendampingannya dilakukan atas kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten, organisasi mitra dan BAN PAUD dan PNF Provinsi. Pendampingannya yang merupakan asesor mendapat surat tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Setiap pendamping mendampingi lembaga-lembaga PAUD yang lokasinya berdekatan dalam satu kelompok. Pertemuan-pertemuan pendampingan luring terjadwal. Komunikasi antara pendamping dan lembaga PAUD dampingannya sangat intensif. Semua keberhasilan ini memperkaya penelitian-penelitian tentang pendampingan akreditasi PAUD.

Keberhasilan pendampingan akreditasi lembaga PAUD ini menjadi tren atau kecenderungan dan bukti ilmiah bagi pemerintah dan pihak-pihak lain untuk mengambil kebijakan. Kebijakan pendampingan tidak harus sama persis dengan apa yang dideskripsikan dalam penelitian ini, tetapi perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah dan lembaga PAUD. Pendampingan akreditasi ini sebenarnya bisa menjadi sebagian materi pelatihan atau *workshop* bagi para pendidik dan pengelola PAUD, sehingga program-program pelatihan dan *workshop* itu tidak hanya mengajarkan proses pendidikan dan pengajaran (Denboba et al., 2015; Chan & Wong, 2010; Carson et al., 2022).

Penelitian ini terbatas pada satu lembaga PAUD dengan metodologi *single case research* dan terbatas pada pendampingan teknis akreditasi. Maka, perlu dilakukan penelitian pada lebih banyak lembaga PAUD dengan metodologi-metodologi penelitian lain. Selain itu, ke depan, penelitian tentang pendampingan akreditasi perlu dikaitkan dengan isu-isu kebijakan tentang rapor pendidikan dan survei lingkungan belajar serta evaluasi-evaluasi pendidikan lainnya dan juga perlu dibandingkan dengan pendampingan akreditasi pada tingkat sekolah dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

Simpulan

Pendampingan akreditasi terhadap lembaga PAUD pada tahap KPA terbukti perlu dan berhasil. Pendampingan itu perlu sebab lembaga PAUD tidak (belum) diwajibkan untuk melakukan akreditasi. Keberhasilan pendampingan ini karena dilakukan dengan kerja sama, perencanaan dan kesungguhan dari Dinas Pendidikan Kabupaten, organisasi mitra, pendamping, BAN PAUD dan PNF Provinsi, dan lembaga PAUD. Keberhasilan ini juga didukung oleh materi pendampingan yang meliputi pemberian motivasi kepada lembaga PAUD, penjelasan yang tepat tentang akreditasi, dan pengajaran keterampilan *scan* dan mengunggah dokumen ke internet. Namun, yang lebih penting lagi adalah pendampingan

perihal penjaminan mutu untuk membangun budaya mutu, bukan sekadar untuk mendapatkan status akreditasi. Sebab, akreditasi bukanlah tujuan, melainkan cara untuk menjamin dan meningkatkan mutu PAUD secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aminah, S., & Amiliya, R. (2021). Analisis Kesiapan dan Kesulitan Lembaga PAUD dalam Menghadapi Akreditasi Melalui Pendampingan Akreditasi BAN PAUD Di TK Islam Al-Madinah Kota Dumai. *Al-Abyadh*, 4(1), 1-3. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Abyadh/article/view/237/153>
- Andarwati, M., & Dwipasari, L. (2014). Desain Sistem Informasi Administrasi Dan Keuangan Paud Untuk Mencapai Akreditasi. *Matics*, 6(2), 65-70. <https://doi.org/10.18860/mat.v6i2.2598>
- BAN PAUD dan PNF. (2022). *Sistem Penilaian Akreditasi PAUD dan PNF*.
- BAN PAUD dan PNF Provinsi DIY. (2022). *Pemenuhan Kuota Akreditasi 30% Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Boyd-Swan, C., & Herbst, C. M. (2020). Influence of quality credentialing programs on teacher characteristics in center-based early care and education settings. *Early Childhood Research Quarterly*, 51(2), 352-365. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2019.12.013>
- Busron, B., & Rachmi, T. (2020). Analisis Capaian Standar dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi PAUD Provinsi Banten. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.31000/ceria.v11i2.2335>
- Carson, V., Zhang, Z., Kuzik, N., Adamo, K. B., Predy, M., Crozier, M., Hunter, S., Ogden, N., Goldfield, G. S., & Okely, A. D. (2022). The impact of new government childcare accreditation standards on children's in-care physical activity and sedentary time. *Carson et Al. BMC Public Health*, 22(Carson al. BMC Public Heal.), 1-14. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12888-5>
- Cassidy, D. J., Hestenes, L. L., Hansen, J. K., Hegde, A., Shim, J., & Hestenes, S. (2005). Revisiting the Two Faces of Child Care Quality: Structure and Process. *Early Education & Development*, 16(4), 505-520. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1604_10
- Chan, S. P., & Wong, S. M. (2010). Exploring assessment and accountability for children's learning: A case study of a Hong Kong preschool. *Early Education and Development*, 21(2), 234-262. <https://doi.org/10.1080/10409281003638717>
- Denboba, A., Hasan, A., & Wodon, Q. (Eds. . (2015). Early Childhood Education and Development in Indonesia: An Assessment of Policies Using SABER. In *Early Childhood Education and Development in Indonesia: An Assessment of Policies Using SABER*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0646-9>
- Engel, A., Steven Barnett, W., Anders, Y., & Taguma, M. (2017). *Early Childhood Education and Care: Policy Review Norway*. OECD.
- Febrialismanto, F. (2020). Perbedaan Kemampuan Guru Menggunakan TIK Untuk Pengembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1603-1615. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.743>
- Fithri, R., & Anggraini, W. (2018). Peningkatan Mutu Sekolah TK Melalui Akreditasi Se-Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.31849/paudlectura.v2i01.1982>
- Fleer, M., & Li, L. (2016). A child-centred evaluation model: gaining the children's perspective in evaluation studies in China. *European Early Childhood Education Research Journal*, 24(3), 342-356. <https://doi.org/10.1080/1350293X.2016.1163934>
- Gol-Guven, M. (2018). Ensuring quality in early childhood education and care: the case of Turkey. *Early Child Development and Care*, 188(5), 557-570. <https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1412957>
- Grant, S., Combera, B., Danby, S., Theobald, M., & Thorpe, K. (2017). The quality agenda: governance and regulation of preschool teachers' work. *Cambridge Journal of Education*,

- 48(4), 515–532. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2017.1364699>
- Harvey, L. (2023). Extended Editorial: Quality in Higher Education Author Survey. In *Quality in Higher Education* (Vol. 29, Issue 2, pp. 135–164). <https://doi.org/10.1080/13538322.2022.2153642>
- Hasan, F., Fajarwati, L., & Imamyarha, D. (2021). Peningkatan Partisipasi Akreditasi Melalui Pelatuhan dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Delapan Standar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 27(2), 170–174. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/23726>
- Honig, A. S. (2022). Essentials for excellence in quality early child care. *Early Child Development and Care*, 192(12), 1940–1951. <https://doi.org/10.1080/03004430.2021.1956846>
- Horm, D. M., Barbour, N. E., & Huss-Hage, E. (2019). Accreditation: Supporting Quality and Professionalization in Early Childhood Care and Education. In C. P. Brown, M. B. McMullen, & N. File (Eds.), *The Wiley Handbook of Early Childhood Care and Education* (pp. 567–590). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781119148104.ch25>
- ILYAS, R. (2020). Pemetaan Mutu Akreditasi PAUD dan PNF di Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 4(3), 954–969. <https://jurnalkibalitbangdajbi.com/index.php/newkiki/article/view/83>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (2014).
- Kratochwill, T. R., & Levin, J. R. (2015). Single-case research design and analysis: New directions for psychology and education. In T. R. Kratochwill & J. R. Levin (Eds.), *Single-Case Research Design and Analysis: New Directions for Psychology and Education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315725994>
- Lee, M. Y. (2014). Motivations to Pursue Accreditation in Children’s Mental Health Care: A Multiple Case Study. *Nonprofit Management and Leadership*, 24(3), 239–415. <https://doi.org/10.1002/nml.21098>
- Muldiani, R. F., Hadiningrum, K., Purwaningsih, S. S., Yuningsih, N., & Lusiani, A. (2020). Peningkatan Manajemen Mutu Pos PAUD Melati 10 dan Kenanga 12 Menuju Persiapan Akreditasi PAUD. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(1). <https://doi.org/10.30999/jpkm.v10i1.758>
- Nuryanto, S., & Irmade, O. (2019). Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD di IGTKI Wonosegoro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM-IKP)*, 2(02), 86–93. <https://doi.org/10.31326/jmp-ikp.v2i02.443>
- Pan, Y. J., Liu, Y., & Lau, E. Y. H. (2010). Evaluation of the kindergarten quality rating system in Beijing. *Early Education and Development*, 21(2), 186–204. <https://doi.org/10.1080/10409281003631134>
- Pavlakis, A., & Kelley, C. (2016). Accreditation in the Professions: Implications for Educational Leadership Preparation Programs. *Journal of Research on Leadership Education*, 1(1). <https://doi.org/10.1177/1942775116641663>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. In *Pemerintah Republik Indonesia* (p. 6).
- Purba, R. I., Sinaga, P., Hariandja, E., & Parani, R. (2022). Strategi Asesor Akreditasi PAUD dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini. *Golden Age*, 6(1). <https://doi.org/10.29408/goldenage.v6i01.4512>
- Rhee, O. (2007). Childcare Policy in Korea: Current Status and Major Issues. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 1(1), 59–72. <https://doi.org/10.1007/2288-6729-1-1-59>
- Stader, D. L., Muñoz, A. J., & Rowett, C. (2009). What K-12 leaders can learn from accreditation. *Community College Journal of Research and Practice*, 33(8), 650–657. <https://doi.org/10.1080/10668920903021351>
- Suchodoletz, A. von, Larsen, R., Uka, F., Nadyukova, I., Pakarinen, E., & Lerkkanen, M.-K. (2020). Investigating quality indicators of early childhood education programs in

- Kosovo, Ukraine and Finland. *International Journal of Early Years Education*, 30(2), 290–306. <https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1848527>
- Supriyono, Yuliantina, I., Siregar, N. Y. W., Herawati, N., Suharti, A., Afiah, E. D., Habiburrahman, Gutama, Hibana, Bahruddin, Cahyana, A., Biyanto, Hadiansyah, F., & Nasrulloh. (2022). *Panduan Pelaksanaan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2022*. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- Wernely. (2018). Upaya Peningkatan Kemampuan Guru dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di TK Aisyiyah Kota Dumai. *Jurnal PAJAR*, 2(3). <https://doi.org/10.33578/pjr.v2i3.5539>
- Whitebookc, M., Sakai, L. M., & Howes, C. (2004). Improving and sustaining center quality: The role of naeyc accreditation and staff stability. *Early Education and Development*, 15(3), 305–326. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1503_4
- Williams3120896, D. (2019). Co-op Model for Early Care: Cutting Costs and Improving Quality. *Childhood Education*, 25(5), 54–56. <https://doi.org/10.1080/00094056.2019.1663098>
- Winterbottom, C., & Piasta, S. B. (2015). Does Accreditation Matter? School Readiness Rates for Accredited Versus Nonaccredited Child Care Facilities in Florida’s Voluntary Pre-Kindergarten Program. *Journal of Research in Childhood Education*, 29(1), 60–72. <https://doi.org/10.1080/02568543.2014.978918>
- Won, E., & Adriany, V. (2020). *Purpose of Indonesian Early Childhood Education Accreditation: Is It for Rating Grade of Institutions or Improving Their Quality?* 454(Ecep 2019), 115–120. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200808.022>
- Wong, M. N. C., & Li, H. (2010). From external inspection to self-evaluation: A study of quality assurance in Hong Kong kindergartens. *Early Education and Development*, 21(2), 205–233. <https://doi.org/10.1080/10409281003638725>
- Wong, M. N. C., Wang, X. C., & Li, H. (2010). Accountability and quality in early childhood education: Perspectives from Asia. *Early Education and Development*, 21(2), 163–166. <https://doi.org/10.1080/10409281003640515>